



2021

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN



LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 dalam mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga saran dan kritik serta masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan di tahun yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat dan staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Demikian dan terima kasih.

Praya, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196911221992031003

DAFTAR ISI

Judul..... i

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Lampiran..... vii

Surat Pernyataan Tanggung Jawab viii

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 1

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO) 3

III. NERACA..... 6

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)..... 8

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) 10

BAB I PENDAHULUAN 10

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 10

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 11

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 11

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR

PENCAPAIAN KINERJA APBD 15

2.1 Kebijakan Keuangan 15

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 16

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 17

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Secara Umum..... 17

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan 18

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 19

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD..... 19

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD..... 19

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD..... 19

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan
Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan SKPD 24

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 25

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 25

5.2	Pos-pos Laporan Operasional.....	35
5.3	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
5.4	Pos-pos Neraca	37
5.5	Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban	44
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....		45
6.1	Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	45
6.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	45
BAB VII PENUTUP		48
LAMPIRAN.....		49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Tingkat Kinerja 17

Tabel 3.1 Realisasi Belanja..... 18

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah..... 25

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah..... 26

Tabel 5.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28

Tabel 5.4 Rincian Belanja..... 28

Tabel 5.5 Belanja Operasi..... 29

Tabel 5.6 Belanja Pegawai..... 30

Tabel 5.7 Belanja Barang dan Jasa 31

Tabel 5.8 Belanja Modal..... 32

Tabel 5.9 Belanja Peralatan dan Mesin 32

Tabel 5.10 Belanja Gedung dan Bangunan 34

Tabel 5.11 Surplus/(Defisit) 35

Tabel 5.12 Pendapatan-LO 36

Tabel 5.13 Rincian Beban..... 36

Tabel 5.14 Mutasi Aset Lancar..... 38

Tabel 5.15 Rincian Persediaan..... 39

Tabel 5.16 Aset Tetap..... 40

Tabel 5.17 Mutasi Aset Tetap..... 40

Tabel 5.18 Mutasi Aset Lainnya..... 42

Tabel 5.19 Kewajiban 43

Tabel 5.20 Ekuitas 43

Tabel 6.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 46

Tabel 6.2 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin 46

Tabel 6.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan 46

Tabel 6.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan 47

Tabel 6.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan 47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Stock Opname
2. Daftar Persediaan
3. Perhitungan Kas Bendahara Pengeluaran
4. Rekening Listrik dan Air Bulan Januari 2022

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah
NIP.196911221992031004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Retribusi Daerah	978,620,000.00	768,638,300.00	78.54	507,576,500.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	701,314.00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-		#DIV/0!	11,483,123.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	978,620,000.00	769,339,614.00	78.61	519,059,623.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	978,620,000.00	769,339,614.00	78.61	519,059,623.00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3,993,562,901.00	3,930,594,587.00	98.42	3,137,664,201.00
Belanja Barang dan Jasa	17,183,518,358.00	17,052,686,424.00	99.24	1,422,250,599.00
Belanja Hibah				10,240,000.00
Jumlah Belanja Operasi	21,177,081,259.00	20,983,281,011.00	99.08	4,570,154,800.00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	693,635,989.00	690,787,970.00	99.59	43,527,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123,563,600.00	122,393,000.00	99.05	219,900,000.00
Jumlah Belanja Modal	817,199,589.00	813,180,970.00	99.51	263,427,000.00
JUMLAH BELANJA	21,994,280,848.00	21,796,461,981.00	99.10	4,833,581,800.00
SURPLUS/DEFISIT	(21,015,660,848.00)	(21,027,122,367.00)		(4,314,522,177.00)

Praya, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



H. SUPAIDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19691221992031004

**LAPORAN OPERASIONAL
(LO)**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

AKUN AKRUAL	URAIAN	DINAS PERHUBUNGAN			
		SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
4	PENDAPATAN DAERAH-LO	769,339,914.00	519,059,623.00	250,280,291.00	48.22
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	769,339,914.00	519,059,623.00	250,280,291.00	48.22
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		-		
4.1.2	Retribusi Daerah	768,638,600.00	507,576,500.00	261,062,100.00	51.43
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	701,314.00	11,483,123.00	(10,781,809.00)	(93.89)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	-	-	-	-
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	-	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Dana Darurat-LO				
	JUMLAH PENDAPATAN	769,339,914.00	519,059,623.00	250,280,291.00	48.22
5	BEBAN DAERAH				
5.1	BEBAN OPERASI	20,983,281,011.00	7,913,147,222.00	13,070,133,789.00	165.17
5.1.1	Beban Pegawai	3,930,594,587.00	3,137,664,201.00	792,930,386.00	25.27
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	17,052,686,424.00	2,550,839,325.00	14,501,847,099.00	568.51
5.1.3	Beban Bunga				
5.1.5	Beban Hibah	-	10,240,000.00	(10,240,000.00)	(100.00)
	Beban Penyisihan				
	Beban Lain-lain				
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	2,214,403,696.00	(2,214,403,696.00)	(100.00)
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
	JUMLAH BEBAN	20,983,281,011.00	7,913,147,222.00	13,070,133,789.00	165.17
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(20,213,941,097.00)	(7,394,087,599.00)	(12,819,853,498.00)	173.38
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-	-	-
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek - LO				
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	3,887,450.00	(3,887,450.00)	(100.00)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	3,887,450.00	(3,887,450.00)	(100.00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(3,887,450.00)	3,887,450.00	(100.00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20,213,941,097.00)	(7,397,975,049.00)	(12,815,966,048.00)	173.24
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
5.3.1.01.01	Beban Luar Biasa				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(20,213,941,097.00)	(7,397,975,049.00)	(12,815,966,048.00)	173.24

Praya, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah
H. SUPRIATNO, S.Sos., M.Si
NIP. 194911211992031004

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	-	-
7	Setara Kas	-	-
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Kas lainnya	-	-
11	Piutang Pendapatan	-	-
12	Piutang Pajak Daerah	-	-
13	Piutang Retribusi Daerah	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
15	Piutang Lain-lain PAD	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
18	Piutang Lainnya	53,757,000.00	53,757,000.00
19	Uang Muka Pekerjaan	53,757,000.00	53,757,000
20	Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan	43,978,500.00	6,090,800
24	JUMLAH ASET LANCAR	97,735,500.00	59,847,800.00
25			
26	ASET TETAP		
27	Tanah	2,253,000,000.00	2,253,000,000
28	Peralatan dan Mesin	14,362,678,862.61	13,671,890,893
29	Gedung dan Bangunan	4,286,088,996.23	4,163,695,996
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21,394,401,880.00	21,394,401,880
31	Aset Tetap Lainnya	-	-
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	(10,813,782,416.00)	(10,813,782,416)
34	JUMLAH ASET TETAP	31,482,387,322.84	30,669,206,353
35			
36	ASET LAINNYA		
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
38	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
39	Aset Tidak Berwujud		
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
41	Aset Lain-lain	99,493,340.00	99,493,340
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
43	JUMLAH ASET LAINNYA	99,493,340.00	99,493,340.00
44			
45	JUMLAH ASET	31,679,616,162.84	30,828,547,492.84
46			
47	KEWAJIBAN		
48	Kewajiban Jangka Pendek		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
50	Utang Bunga	-	-
51	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
52	Utang Belanja	1,209,784,059.00	1,008,393,797
53	Utang Transfer	-	-
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
55	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,209,784,059.00	1,008,393,797
56			
57	JUMLAH KEWAJIBAN	1,209,784,059.00	1,008,393,797
58	EKUITAS		
59	EKUITAS	30,469,832,103.84	29,820,153,696
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31,679,616,162.84	30,828,547,492.84



Palu, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah
H. SUPARIAN, S.Sos., M.Si
No. 196/122/1993/03/1004

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	29,944,464,475.84	33,041,976,962.84
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(20,213,941,097.00)	(7,397,975,099.00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	45,670,435.00
	Koreksi Nilai Kas	-	-
	Koreksi Nilai Piutang	-	53,757,000.00
	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Koreksi Nilai Investasi	-	-
	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	(8,086,565.00)
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	-
	Koreksi Nilai Kewajiban	-	-
	R/K PPKD	21,047,502,367.00	4,254,792,177.00
4	EKUITAS AKHIR	30,778,025,745.84	29,944,464,475.84

Praya, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah
H. SUPRIAN, S.Sos., M.Si
NIP. 196911221992031004



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Dinas Perhubungan

Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010).

Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun*

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- j. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 entan Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan –LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan – LO

5.2.2. Beban

5.3. Pos-pos laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4. Pos-pos Neraca

5.4.1. Aset

5.5. Pengungkapan atas pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup

Lampiran

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN KINERJA APBD

2. 1. Kebijakan Keuangan

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menetapkan indikator pencapaian target kinerja yaitu :

Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Tingkat Kinerja

No.	Program	Sasaran	Indikator
A	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar Perhubungan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaporan capaian kinerja SKPD	- Nilai SAKIP OPD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	- Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya keselamatan dan ketertiban perijinan pelayaranan	- Persentase penerbitan PAS kecil Angkutan laut

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 21.994.280.848,00 dengan rincian untuk Belanja operasi Rp 21.177.081.259,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 817.199.589,00 yang direalisasikan dalam 4 (empat) program dan 15 (empat belas) kegiatan.

Realisasi belanja secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dirinci seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Operasi	21,177,081,259.00	20,983,281,011.00	193,800,248.00	99,08
2	Belanja Modal	817,199,589.00	813,180,970.00	4,018,619.00	99,50
Jumlah		21,994,280,848.00	21,796,461,981.00	197,818,867.00	99,10

Sumber: Laporan Realisasi TA. 2021Dishub

Dari Tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mencapai angka Rp 21,796,461,981,00 dari anggaran sebesar Rp 21.994.280.848,00 atau mencapai 99,10% yang uraian selengkapnya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari laporan ini.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai angka 99,10%. Pagu anggaran sebesar Rp 21.994.280.848,00 tersebut merupakan hasil refocusing dan realokasi pagu anggaran yang diarahkan untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19). Adapun besaran pagu anggaran sebelum refocusing adalah Rp 23.127.608.121,00 atau terjadi pengurangan sebesar 4,90%.

Beberapa kegiatan yang mengalami refocusing dan realokasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pemangkasan anggaran belanja modal yaitu pengadaan alat uji side slip tester, alat uji tint tester dan gembok parkir
2. Pemangkasan anggaran belanja pengadaan pakaian dinas lapangan
3. Pemangkasan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, seperti perjalanan dinas, makan minum rapat, bahan bakar minyak, ATK, dll.

Pemangkasan anggaran tersebut berakibat pada tidak dapat tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan, termasuk pada target RPJMD. Sehingga dengan tidak tercapainya target RPJMD tersebut pada Tahun Anggaran 2021 maka kami berkomitmen untuk menganggarkan kembali beberapa target yang telah ditetapkan tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas SKPD. Basis kas untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan

nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD. Oleh karena itu SKPD menyelenggarakan sistem Akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. CaLK.

5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Dari target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp 978.620.000,00 dapat terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 769.339.614,00 atau sebesar 78,54%. Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi	978,620,000.00	768,638,300.00	78,54
3	Lain-lain PAD yang Sah	-	701,314.00	-
Jumlah		978,620,000.00	769,339,614.00	78,54

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak terdapat pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, sehingga tidak ada realisasi untuk Pajak Daerah.

b) Retribusi Daerah

Dari target pendapatan retribusi daerah yang dianggarkan sebesar Rp 978.620.000,00 dapat terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 768.638.300,00 atau sebesar 78,54%. Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah Semester II 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Retribusi Jasa Umum</i>	954.620.000,00	668.638.300,00	74,33
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	590.100.000,00	218.857.000,00	37,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	364.520.000,00	449.781.300,00	123,39
2	<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	24.000.000,00	100.000.000,00	416,67
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	24.000.000,00	100.000.000,00	416,67
Jumlah		978.620.000,00	768,638,300,00	78,54

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Dari target sebesar Rp 590.100.000,00 pencapaian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 218.857.000,00 atau sebesar 37,00%. Beberapa kendala yang dihadapi pada pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini antara lain:

- Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya aktivitas perekonomian secara langsung juga berdampak pada jumlah retribusi parkir yang dapat dipungut
- Beberapa titik parkir pada tempat-tempat wisata dikelola langsung oleh Desa (Pokdarwis) dan setoran parkirnya tidak diserahkan ke Dinas Perhubungan
- Maraknya parkir liar. Untuk meminimalisir hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah melalui Bidang Teknik dan Angkutan Umum terus melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban secara rutin.
- Perbup No. 35 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir belum berlaku secara maksimal pada tahun 2021. Diharapkan dengan berlakunya Perbup ini maka seluruh titik parkir yang ditetapkan dalam Perbup tersebut dapat dipungut retribusinya secara lebih optimal.

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pencapaian perolehan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 123,39% atau Rp 449.781.300,00 dari anggaran sebesar Rp 364.520.000,00. Walaupun pencapaian untuk pada Tahun Anggaran 2021 terjadi penurunan tingkat persentase capaian retribusi hal ini disebabkan karena pada masa bulan Januari-April UPTD PKB masih melakukan proses akreditasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian sehingga proses pengujian dimulai pada bulan Mei hal ini menyebabkan pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan tingkat persentase capaian.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu :

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

Dari target Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp 24.000.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp100.000.00,00

atau sebesar 416,67%. Tempat Khusus Parkir yang dimaksud disini adalah tempat khusus parkir pada pasar renteng.

c) Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 701.314,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah per 31 Desember 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	-	701.314,00	-
	Kerugian Uang	-	701.314,00	-
Jumlah		-	701,314,00	-

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Pendapatan dari Kerugian Uang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran tunjangan keluarga (anak) an. Mahli, S.IP.

5.1.2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp 21.994.280.848,00 berhasil tercapai realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 21.796.461.981,00 atau sebesar 99,10% dengan sisa anggaran sebesar Rp 197.818.367,00 atau sebesar 0,90%.

Adapun rincian Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rincian Belanja per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Operasi	21.177.081.259,00	20.983.281.011,00	193.800.248,00	99,08
2	Belanja Modal	817.199.589,00	813.180.970,00	4.018.600,00	99,50
Jumlah		21.994.280.848,00	21.796.461.981,00	197.818.867,00	99,10

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Rincian Belanja terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Anggaran Belanja Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 21.177.081.259,00 dengan nilai realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp.20.983.281.011,00 atau sebesar 99,08%. Realisasi Belanja Operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Belanja Operasi per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.993.562.901,00	3.930.594.587,00	62.968.314,00	98,41
2	Belanja Barang	17.183.518.358,00	17.052.686.424,00	130.831.934,00	99,38
Jumlah		21.177.081.259,00	20.983.281.011,00	193.800.248,00	99,08

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Realisasi Belanja Operasi di atas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 ini terdiri atas Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.930.594.587,00 dari target anggaran sebesar Rp 3.993.562.901,00 atau mencapai 98,41% yang diuraikan pada Tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6 Belanja Pegawai per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	2.710.344.342,00	2.708.506.929,00	1.837.413,00	99,99
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.090.543.586,00	2.090.389.580,00	154.006,00	99,99
	Tunjangan Keluarga	246.667.221,00	246.538.843,00	128.387,00	99,95
	Tunjangan Jabatan	149.709.750,00	148.330.000,00	1.379.750,00	99,08
	Tunjangan Fungsional	6.182.000,00	6.160.000,00	22.000,00	99,64
	Tunjangan Fungsional Umum	70.116.500	70.105.000,00	11.500,00	99,98
	Tunjangan Beras	141.542.718,00	141.436.000,00	106.458,00	99,92
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	5.519.903,00	5.515.815,00	4.088,00	99,93
	Pembulatan Gaji	62.664,00	31.440,00	31.224,00	50,17
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.205.120.059 ,00	1.172.501.908,00	32.618.151,00	97,29
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.205.120.059,00	1.172.501.908,00	32.618.151,00	97,29
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.347.500,00	25.834,750,00	28.512.750,00	47,54
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.705.000,00	5.265.750,00	25.439.250,00	17,15
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	23.642.500,00	20.569.000,00	3.037.500,00	87
4	Beban Honorarium	23.751.000,00	23.751.000,00	-	100
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.751.000,00	23.751.000,00	-	100
Jumlah		3.993.562.901,00	3.930.594.587,00	62.968.314,00	98,43

Sumber: LRA Rinci TA 2021

2. **Belanja Barang dan Jasa**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 17.183.518.358,00 berhasil terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.052.686.424,00 atau sebesar 99,23%. Belanja Barang dan Jasa terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, serta Honorarium PNS dan Non PNS. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7 Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.943.537.920,00	3.857.082.419,00	86.455.501,00	97,80
2	Belanja Jasa Kantor	12.302.772.128,00	12.280.220.275,00	22.551.853,00	99,81
3	Belanja jasa Kontruksi	33.353.320,00	33.160.700,00	193.320,00	99,42
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	21.259.000,00	21.259.000,00	-	100,00
5	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	326.800.000,00	326.800.000,00	-	100,00
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	476.476.000,00	475.765.000,00	711.000,00	99,85
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.300.000,00	58.399.030,00	20.900.970,00	73,64
Jumlah		17.183.518.358,00	17.052.686.424,00	15.915.501,00	99,23

Sumber: LRA Rinci Dishub TA 2021

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terlihat bahwa realisasi Belanja Barang dan Jasa secara rata-rata mencapai 99,23%.

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Anggaran Belanja Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 817.199.589,00 dengan jumlah realisasi sampai dengan tanggal

31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 813.180.890,00 atau mencapai 99,01%. Adapun rincian dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini:

Tabel 5.8 Belanja Modal per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	693,635,989.00	690,787,970.00	2,848,019.00	99.58
2	Belanja Bangunan dan Gedung	123,563,600.00	122,393,000.00	1,170,600.00	99.05
3	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah		817,199,589.00	813,180,970.00	4,018,619.00	99.50

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 ini terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin serta Belanja Gedung dan Bangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 693.635.989,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 690.787.970,00 atau mencapai 99,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pengadaan Infocus	12,500,000.00	11,100,000.00	1,400,000.00	88,8
	Pengadaan LCD Projector/Infocus	12,500,000.00	11,100,000.00	1,400,000.00	88,8
2	Pengadaan Mebel	81,178,685.00	81,127,200.00	51,485.00	99,93
	Pengadaan Kursi Besi Tangan Putar (19 buah)	35,503,685.00	35,488,200.00	15,485,00	99,95
	Pengadaan set cukli (1 set)	19,330,500.00	19,299,500.00	31,000.00	99,83
	Pengadaan Meja Rapat Bundar (1 Set)	26,344,500.00	26,339,500.00	5,000.00	99,98
3	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	19,330,500.00	19,330,500.00	-	100
	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	19,330,500.00	19,330,500.00	-	100

	Eselon II (1 buah)				
4	Pengadaan Alat Pendingin	12,043,200.00	12,000,000.00	43,200.00	99,64
	Pengadaan AC Split (2 Unit)	12,043,200.00	12,000,000.00	43,200.00	99,64
5	Pengadaan Komputer Unit lainnya	22,500.000,00	22,500.000,00	-	100
	Pengadaan Notebook (3 unit)	22,500,000.00	22,500.000,00	-	100
6	Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	6,000,000.00	-	100
	Pengadaan Printer (1 buah)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100
7	Pengadaan Bahan Material PJU	1,973,400.00	1,973,400.00	-	100
	Pengadaan Bor Tangan (2 buah)	1,973,400.00	1,973,400.00	-	100
8	Pengadaan Alat Perlengkapan Teknisi PJU	21,074,204.00	21,070,870.00	3,334.00	99,98
	Pengadaan Perkakas Bengkel listrik - Pengadaan Alat Perlengkapan Teknisi PJU (1 Paket)	21,074,204.00	21,070,870.00	3,334.00	99,98
9	Pengadaan Rambu Bersuar	164,800,000.00	164,800,000.00	-	100
	Pengadaan Rambu Bersuar (1 paket)	164,800,000.00	164,800,000.00	-	100
	Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	93,936.000,00	93,936.000,00	-	100
	Pengadaan Rambu Tidak Bersuar (1 Paket)	93,936.000,00	93,936.000,00	-	100
10	Pengadaan Alat Kantor	16,500,00.00	16,500,00.00	-	100
	Pengadaan Perangkat Smartcard (1 paket)	16,500,00.00	16,500,00.00	-	100
11	Pengadaan Modal Komputer	22,500,000.00	22,500,000.00	-	100
	Pengadaan Notebook (1 unit)	22,500,000.00	22,500,000.00	-	100
12	Pengadaan Peralatan Komputer	119,300,000.00	118,350,000.00	950,000.00	99,20
	Pengadaan Perangkat Smartcard (1 paket)	119,300,000.00	118,350,000.00	950,000.00	99,20
13	Pengadaan Modal Alat besar	100,000,000.00	99,600,000.00	400,000.00	99,6

	Pengadaan Upgrading Alat Uji Axle load Meter	100,000,000.00	99,600,000.00	400,000.00	99,6
Jumlah		693,635,989.00	690,787,970.00	2,848,019.00	99.58

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi fisik pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sudah mencapai 100% per 31 Desember 2021 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,58%.

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 122.393.000,00 dari anggaran sebesar Rp 123.563.600,00 atau mencapai 99,05%. Adapun rincian dari Belanja Gedung dan Bangunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Pengadaan modal gedung bangunan	14,958,600.00	13,980,000.00	978,600.00	93,45
	Pengadaan Ruangn Sekdis	13,980,000.00	13,980,000.00	-	100
	Biaya Perencanaan	419,400.00	-	419,400.00	-
	Biaya Pengawasan	559,200.00	-	559,200.00	-
2	Pengadaan modal gedung bangunan	108,605,000.00	108,413,000.00	192,000.00	99,82
	Biaya Penembokan halaman UPT PKB (lanjutan)	101,500,000.00	101,342,000.00	158,000.00	99,84
	Biaya Perencanaan	3,045,000.00	3,045,000.00	-	100
	Biaya Pengawasan	4,060,000.00	4,026,000.00	34,000.00	99,16
Jumlah		123,563,600.00	122,393,000.00	1,170,600.00	99.05

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa realisasi fisik pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sudah mencapai 100% per 31 Desember 2021 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,05%.

5.1.3. Surplus/Defisit

Dari perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 21.068.352.667,00 yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut ini:

Tabel 5.11 Surplus/(Defisit) per 31 Desember 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan	978.620.000,00	728.109.314,00	74,40	525.443.82,00
2	Belanja	21.994.280.848,00	21.796.461.981,00	99,1	4.833.581.800,00
Surplus/(Defisit)		(21.015.660.848,00)	(21.068.352.667,00)	100	(4.308.137.977,00)

Sumber: LRA Dishub TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 21.068.352.667,00 dari yang direncanakan sebesar Rp 21.015.660.848,00

5.2. Pos-Pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berupa Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang hingga tanggal 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 769,339,614.00 yang dapat diuraikan pada Tabel 5.13 berikut ini:

Tabel 5.12 Pendapatan-LO per 31 Desember 2021

No	Uraian	LRA	LO
1	Pendapatan Pajak	-	-
2	Pendapatan Retribusi	768,638,300.00	768,638,600.00
	Retribusi Jasa Umum	668,638,000.00	668,638,600.00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	218,857,000.00	218,857,300.00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	449,781,300.00	449,781,300.00
	Retribusi Jasa Usaha	100,000,000.00	100,000,000.00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100,000,000.00	100,000,000.00
3	Lain-lain PAD yang Sah	701,314.00	701,314.00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	701,314.00	701,314.00
	Kerugian Uang	701,314.00	701,314.00
Jumlah		769,339,614.00	769,339,614.00

Sumber: LO Dishub TA 2021

5.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013). Beban pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat diuraikan pada Tabel 5.14 berikut ini:

Tabel 5.13 Rincian Beban TA 2021

No	Uraian	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Pendapatan - LO	769,339,614.00	519,059,623.00
2	Beban	20,983,281,011.00	5,698,743,526.00
	Beban Pegawai – LO	3,930,594,587.00	3,137,664,201.00

	Beban Hibah	-	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	
	Beban Persediaan	3,857,082,419.00	303,357,050.00
	Beban Jasa	13,137,204,975.00	2,176,123,588.00
	Beban Perjalanan Dinas	58,399,030.00	71,358,687.00
	Beban Hibah		10,240,000.00
	Surplus/Defisit dari Operasi	(20,213,941,397.00)	(5,179,683,903.00)

Sumber: LO Dishub TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa per tanggal 31 Desember 2021 jumlah Pendapatan-LO adalah sebesar Rp 769,339,614.00 sedangkan jumlah Beban adalah Rp 20,983,281,011.00 sehingga terjadi defisit dari operasi sebesar Rp 20,213,941,397.00.

5.3. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2021 terdapat ekuitas awal sejumlah Rp 29,944,464,475.84 yang berasal dari jumlah ekuitas tahun 2020, karena terdapat Defisit-LO sebesar Rp 20,213,941,397.00 dengan R/K PPKD sebesar Rp. 21,047,502,367.00 maka jumlah ekuitas akhir Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.778.025.445,00

5.4. Pos-Pos Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 33.879.616.212,84 dan Rp 30.828.547.542,84 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 97,735,500,00 dan Rp 59.847.800,00 0 yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.15 berikut ini:

Tabel 5.14 Mutasi Aset Lancar per 31 Desember 2021

Jenis Aset Lancar	Saldo 2021	Aset Lancar		Saldo 2020
		Tambah	Kurang	
Kas dan Setara Kas	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	-	-	-	-
Piutang Lainnya	53,757,000.00	-		53,757,000.00
Uang Muka Kerja	53,757,000.00	-		53,757,000.00
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-
Persediaan	43,978,500.00	43,978,500.00	6.090.800,00	6.090.800,00
Jumlah Aset Lancar	97,735,500.00			59,847,800.00

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2021

✓ **Kas di Bendaharan Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

✓ **Piutang Pendapatan**

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diukur

sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk Tahun Anggaran 2021 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki piutang pendapatan.

✓ **Piutang Lainnya**

Piutang Lain-lain pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.757.000,00 dan Rp Rp 53.757.000,00. Piutang ini berasal dari piutang uang muka yang telah dibayarkan pada CV. Aiko Yutaka pada pekerjaan pengadaan Alat Uji Kincup Roda Depan (*Side Slip*) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Tahun Anggaran 2019. Piutang ini telah disetorkan sebagian ke Kas Daerah pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 5.973.000,00 sehingga pada Tahun 2021 sisa piutang menjadi Rp 53.757.000,00.

✓ **Persediaan**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 43.978.500,00 dan Rp 6.090.800,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021

No	Jenis Persediaan	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Persediaan ATK	203.500,00	0,00
2	Barang Cetak	43.775.000,00	6.090.800,00
Jumlah		43.978.500,00	6.090.800,00

Sumber: Lap. Stock Opname Dishub TA 2021

Persediaan terdiri atas Persediaan ATK dan Persediaan Barang Cetak/Kuasi yang rincian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 31.482.387.322,84 dan Rp 30.669.206.352,84. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdapat pada Dinas Perhubungan yang rinciannya dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.16 Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Uraian	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Tanah	2,253,000,000.00	2,253,000,000.00
2	Peralatan dan Mesin	14,362,678,862.00	13.671.890.892,61
3	Gedung dan Bangunan	4,286,088,996.23	4.163.695.996,23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,394,401,880.00	21,394,401,880.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	
6	Akumulasi Penyusutan		(10.813.782.416,00)
Jumlah		31,482,387,322.84	30.669.206.352,84

Sumber: Neraca Dishub TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 31.482.387.322,84. Dari Tabel di atas juga terlihat bahwa Aset

Peralatan dan Mesin mengalami reklas dari Aset Gedung dan Bangunan yang nilainya diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.17 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	Saldo 2021	Aset Tetap		Saldo 2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	2,253,000,000.00	-	-	2,253,000,000.00
Peralatan dan Mesin	14,362,678,862.61	690,787,970.00		13,671,890,892.61
Gedung dan Bangunan	4,286,088,996.23	122,393,000.00		4,163,695,996.23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,394,401,880.00			21,394,401,880.00
Aset Tetap Lainnya				-
Akumulasi Penyusutan				(10,813,782,416.00))
Jumlah Aset Tetap	31,482,387,322,84	813,180,970,00		30,669,206,352.84.8

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2021

Mutasi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki mutasi aset tetap dalam bentuk tanah, sehingga nilainya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.253.000.000,00.

2) Peralatan Mesin

Untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, per 31 Desember 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengalami penambahan aset sebesar Rp 690.787.970,00 yang rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.10.

3) Gedung dan Bangunan

Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan, per 31 Desember 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengalami penambahan asset sebesar Rp 122,393.000,00 yang rinciannya telah diuraikan pada Tabel 5.11.

4) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki mutasi aset tetap dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan, sehingga nilainya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 21.394.401.880,00.

c. **Aset Lainnya**

Jumlah aset lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 99.493.390,00 dimana mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 99.493.390,00 per 31 Desember 2020. Perubahan jumlah aset lainnya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.18 Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Jenis Aset Lainnya	Saldo 2021	Aset Lainnya		Saldo 2020
		Tambah	Kurang	
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Aset Lain-lain		-	-	99.493.390,00
Aset Lain-lain Rusak Berat	67.843.390,00			67.843.390,00
Detail Engineering Design (DED)	31.650.000,00			31.650.000,00
Barang yang diserahkan kpd masyarakat				
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Jumlah Aset Lainnya	99.493.390,00			99.493.390,00

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2021

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban atau yang disebut juga dengan istilah Hutang terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan di masa mendatang dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar dan memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya relatif lama. Kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.20 berikut ini:

Tabel 5.19 Kewajiban per 31 Desember 2021

Jenis Kewajiban	Saldo 2021	Kewajiban		Saldo 2020
		Tambah	Kurang	
Kewajiban Jangka Pendek	1,209,784,059.00	1,209,784,059.00	1,008,393,797.00	1,008,393,797.00
Utang Barang dan jasa	1,209,784,059.00	1,209,784,059.00	1,008,393,797.00	1,008,393,797.00
Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Jumlah Kewajiban	1,209,784,059.00	1,209,784,059.00	1,008,393,797.00	1,008,393,797.00

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2021

Dari Tabel di atas terlihat bahwa per 31 Desember 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp 1,209,784,059.00 yang merupakan kewajiban atas pembayaran biaya listrik PJU dan Biaya listrik, air dan telepon kantor untuk Bulan Desember 2021 yang terbayar pada Bulan Januari 2022.

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana pada Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30,469,832,103.84 yang merupakan selisih antara nilai aset sebesar Rp 31,679,616,162.84 dan nilai kewajiban sebesar

Rp 1,209,784,059.00. Secara rinci jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 akan diuraikan pada Tabel 5.21 berikut ini:

Tabel 5.20 Ekuitas per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo 2021	Mutasi		Saldo 2020
		Tambah	Kurang	
Aset	31,679,616,162.84			30.828.547.542,84
Aset Lancar	97,735,500.00			59,847,800.00
Aset Tetap	31,482,387,322.84			30,669,206,352.84
Aset Lainnya	99,493,390.00			99.493.390,00
Kewajiban	1,209,784,059.00			1,008,393,797.00
Kewajiban Jangka Pendek	1,209,784,059.00			1,008,393,797.00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	30,469,832,103.84			29.820.153.745,84

Sumber: Neraca Rinci Dishub TA 2021

5.5. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD -- (NIHIL).

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan umum di sektor Perhubungan. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dijelaskan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas: 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPT, dan 1 (satu) orang KTU UPT.

6.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat dianalisa dari dua sisi, yaitu dari sisi kuantitas dan sisi kualitas.

Dari kuantitas yang ada, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan seperti pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan per 31 Desember 2021

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV	3	7,69%
2.	III	23	58,97%
3.	II	13	33,33%
4.	I		
Jumlah		39	100%
5.	Honda (PP.31)	4	
6.	PTT	-	
Total		4	

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Laki	33	84,61 %
2.	Perempuan	6	15,38 %
TOTAL		39	100,00 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Sedangkan secara kualitas, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan seperti pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.3 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Pendidikan per 31 Desember 2021

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	S.2	2	5,12 %
2.	S.1	18	46,15 %
3.	D.III	3	7,69 %
4.	D.II	2	5,12%
5.	D.I	-	-
6.	SLTA	13	33,33 %
7.	SLTP	1	2,56%
8	SD	-	-
TOTAL		39	100 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.4 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2021

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon II.b	1	2,56%
2.	Eselon III.a	1	2,56%
3.	Eselon III.b	2	5,12%
4.	Eselon IV.a	7	17,94%
5.	Eselon IV.b	1	2,56%
6.	Fungsional	2	5,12%
7.	Staf	25	64,10%
TOTAL		39	

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Tabel 6.5. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Penjenjangan per 31 Desember 2021

No	Jenis Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Adum/Diklat. Pim.IV	6	
2.	Adumla	-	
3.	Spama/Diklat Pim.III	2	
4.	Spamen/Diklat Pim.II	-	
TOTAL		8	

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian Dishub Kab. Loteng

Dari Tabel-tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 43 orang yang terdiri atas 39 orang PNS dan 4 orang tenaga Honorer. Berdasarkan jenis kelamin, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 84,61%. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, struktur pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata satu (S1), yaitu sebesar 46,15%, disusul secara berturut-turut oleh SLTA sebesar 33,33%, S2 sebesar 5,12%, DIII sebesar 7,69%, dan terakhir oleh jenjang pendidikan SLTP sebesar 2,56%.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mendukung upaya penerapan akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini.

Praya, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 126911221992031004

LAMPIRAN